



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3221716, Laman : www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 800 / 343 / II.1 / BKD

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan peraturan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
2. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan ketentuan sebagai berikut.

I. INFORMASI UMUM

1. Alokasi kebutuhan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 sebanyak 555 (lima ratus lima puluh lima) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tenaga Kesehatan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan).
 - b. Tenaga Teknis sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh).
2. Informasi mengenai unit kerja dan rincian kebutuhan (jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan) dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini.

II. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN

Jenis penetapan kebutuhan pada pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi :

1. Penetapan Kebutuhan Umum; dan
2. Penetapan Kebutuhan Khusus, dengan kriteria sebagai berikut :
 - Pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

III. PERSYARATAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Kriteria usia sebagaimana berikut :
 - a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun bagi pelamar jabatan dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
3. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
4. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psiktropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
7. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
10. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar Kebutuhan Umum

Berikut persyaratan khusus bagi pelamar kebutuhan umum :

- a. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Untuk kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama;
- c. Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga

Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

- d. Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
- e. Untuk pelamar jabatan Polisi Pamong Praja Pemula dan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, wajib memiliki tinggi badan minimal 160 sentimeter untuk laki-laki, dan 155 sentimeter untuk perempuan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan tinggi badan, sehat jasmani dan rohani, serta bukan penyandang disabilitas;
- f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (dua koma lima) skala 4,00 (empat koma nol).

2. Pelamar Kebutuhan Khusus

Berikut persyaratan bagi pelamar khusus Penyandang Disabilitas :

- a. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - 2) Menyampaikan video singkat dalam bentuk *link*/tautan yang dapat diakses, yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (video dapat diunggah pada media google drive, youtube, dll.).
- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (dua koma lima) skala 4,00 (empat koma nol).

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Seluruh pelamar CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 melakukan pendaftaran melalui portal SSCASN secara *online* pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 20 Agustus s/d 6 September 2024. Adapun mekanisme pendaftaran melalui portal SSCASN sebagai berikut :

1. Membuat akun SSCASN Tahun 2024 pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara :

- a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/ melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP dan kolom persyaratan lainnya;
 - c. Mengunggah *scan* KTP/ Surat keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah benar dan lengkap (apabila terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka tidak akan dapat diperbaiki); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar masuk kembali dengan akun yang telah dibuat ke laman <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
 3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
 4. Pelamar memilih jenis seleksi CPNS;
 5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan memilih formasi jabatan yang dilamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
 6. Pelamar wajib mengunggah hasil **scan** dokumen persyaratan asli yang terdiri dari :
 - a. **Pasfoto** terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. **Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli** atau Surat Keterangan Kependudukan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - c. **Surat Lamaran** ditulis tangan dengan tinta hitam, atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang sudah ditandatangani (tanda tangan basah) dan dibubuhi e-meterai sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini;
 - d. **Ijazah** asli dan dokumen lain terkait kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - e. **Transkrip Nilai** asli sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - f. **Surat Pernyataan 5 poin** yang sudah ditandatangani (tanda tangan basah) dan dibubuhi e-meterai sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini;
 - g. **Surat Pernyataan Bersedia Mengabdikan** pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak mengajukan pindah ke Instansi

- lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, yang sudah ditandatangani (tanda tangan basah) dan dibubuhi e-meterai sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini;
- h. **Sertifikat atau tangkapan layar (screenshot) pada PDDikti/ BAN-PT** dari akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah bagi pelamar dengan tingkat pendidikan D-III dan S-1/D-IV/Profesi;
 - i. **Pelamar Penyandang Disabilitas**, ditambah dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya.
 - j. **Pelamar jabatan Polisi Pamong Praja**, ditambah dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan tinggi badan, sehat jasmani dan rohani, serta bukan penyandang disabilitas.
7. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada dokumen yang dipersyaratkan wajib menggunakan e-meterai, pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://meterai-elektronik.com>;
 8. Pelamar memastikan data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah harus sudah lengkap, benar, jelas dan dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dan pembubuhan e-meterai dapat menyebabkan berkas tidak terverifikasi dengan baik dan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
 9. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak kartu pendaftaran SSCASN Tahun 2024, sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

V. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi pengadaan CPNS terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

A. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, website Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada laman <https://kalteng.go.id/>, dan website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada laman <https://bkd.kalteng.go.id/>;
3. Pelamar yang memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

B. SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS, yang terdiri dari :
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b. Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
2. SKD dilaksanakan di masing-masing tempat pelaksanaan tes yang ditentukan berdasarkan lokasi ujian yang dipilih pelamar pada saat pendaftaran;
3. Pelamar dapat melihat informasi tanggal, sesi, waktu, dan tempat pelaksanaan tes pada website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Pelamar hanya dapat melaksanakan SKD pada tanggal, sesi, waktu, dan tempat pelaksanaan tes yang telah ditentukan;
5. Pada saat pelaksanaan SKD, pelamar wajib menunjukkan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2024 dan KTP asli yang masih berlaku/Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat berwenang yang masih berlaku;
6. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas, sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 2 dan 3.
7. Hasil kelulusan SKD akan diumumkan melalui website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan website Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

C. SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

1. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud romawi V huruf B mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - b. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum, sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan;
 - c. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 7 masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.
2. SKB dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
3. Materi SKB :

- a. Materi SKB untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina JF dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT BKN;
- b. Materi SKB untuk Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.

VI. PENGOLAHAN HASIL AKHIR SELEKSI

1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan /atau berperingkat terbaik;
2. Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan nilai paling rendah 65 (enam puluh lima) dan tertinggi adalah 150 (seratus lima puluh);
 - b. Tes Intelegensia Umum (TIU) dengan nilai paling rendah 80 (delapan puluh) dan tertinggi adalah 175 (seratus tujuh puluh lima); dan
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan nilai paling rendah 166 (seratus enam puluh enam) dan tertinggi adalah 225 (dua ratus dua puluh lima); nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas) dan nilai kumulatif SKD tertinggi adalah 550 (lima ratus lima puluh);
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikecualikan bagi penetapan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas, yaitu
 - a. Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 - b. Nilai Tes Intelegensia Umum (TIU) dengan nilai paling rendah 60 (enam puluh).
4. Pengolahan hasil akhir seleksi pengadaan merupakan pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
5. Pengolahan hasil akhir seleksi pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dilakukan oleh ketua Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
6. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :
 - a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
 - b. Jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum, sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan yang tertinggi;
 - c. Jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk

- lulusan sekolah menengah atas/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
- d. Jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
7. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 6, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
 - b. Bagi jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.
 8. Dalam hal Instansi telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
 9. Hasil akhir seleksi pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan melalui website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan website Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

VII. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara terbuka melalui website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan website Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

VIII. USUL PENETAPAN NIP

1. Pelamar yang dinyatakan lulus pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 wajib melengkapi berkas/dokumen sebagai dasar usul penetapan NIP;
2. Berkas/dokumen usul penetapan NIP sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diumumkan pada saat pengumuman hasil akhir pengadaan.

IX. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI CPNS TAHUN ANGGARAN 2024

Jadwal pelaksanaan seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Jadwal |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 19 Agustus s.d. 2 September 2024 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 20 Agustus s.d. 6 September 2024 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 20 Agustus s.d. 13 September 2024 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 14 s.d. 17 September 2024 |
| 5 | Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi | 18 s.d. 28 September 2024 |
| 6 | Masa Sanggah | 18 s.d. 20 September 2024 |
| 7 | Jawab Sanggah | 18 s.d. 22 September 2024 |
| 8 | Pengumuman Pasca Masa Sanggah | 21 s.d. 27 September 2024 |
| 9 | Penarikan data final SKD CPNS | 29 September s.d. 1 Oktober 2024 |
| 10 | Penjadwalan SKD CPNS | 2 s.d. 8 Oktober 2024 |
| 11 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS | 9 s.d. 15 Oktober 2024 |
| 12 | Pelaksanaan SKD CPNS | 16 Oktober s.d. 14 November 2024 |
| 13 | Pengolahan Nilai SKD CPNS | 23 Oktober s.d. 16 November 2024 |
| 14 | Pengumuman Hasil SKD CPNS | 17 s.d. 19 November 2024 |
| 15 | Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT | 20 November s.d. 17 Desember 2024 |
| 16 | Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT | 20 s.d. 22 November 2024 |
| 17 | Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi | 23 s.d. 25 November 2024 |
| 18 | Penarikan data final SKB CPNS | 26 s.d. 28 November 2024 |
| 19 | Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT | 29 November s.d. 3 Desember 2024 |
| 20 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT | 4 s.d. 8 Desember 2024 |
| 21 | Pelaksanaan SKB CPNS | 9 s.d. 20 Desember 2024 |
| 22 | Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS | 17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025 |
| 23 | Pengumuman Hasil CPNS | 5 s.d. 12 Januari 2025 |
| 24 | Masa Sanggah | 13 s.d. 15 Januari 2025 |
| 25 | Jawab Sanggah | 13 s.d. 19 Januari 2025 |

| No | Kegiatan | Jadwal |
|----|----------------------------------|----------------------------------|
| 26 | Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah | 15 s.d. 20 Januari 2025 |
| 27 | Pengumuman Pasca Sanggah | 16 s.d. 22 Januari 2025 |
| 28 | Pengisian DRH NIP CPNS | 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 |
| 29 | Usul Penetapan NIP CPNS | 22 Februari s.d. 23 Maret 2025 |

X. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat ketentuan dan persyaratan pelaksanaan seleksi yang ada dalam pengumuman ini;
2. Kesalahan dalam melakukan pemindaian dokumen (dokumen tidak terbaca, terpotong, buram) dan pengunggahan pada saat pendaftaran (dokumen tidak sesuai, dokumen tidak terbaca) yang mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi merupakan kelalaian pelamar;
3. Bagi pelamar yang terbukti membantu dan/ atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan ASN, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;
4. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan seleksi CPNS pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka pelamar tersebut dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus seleksi pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
5. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan NIP kemudian mengundurkan diri, akan dikenakan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan ASN berikutnya;
6. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat membatalkan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. Tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
 - e. Meninggal dunia.
7. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka berdasarkan usulan dari PPK kepada Ketua Panselnas, Ketua Panselnas memberikan usulan nama pengganti dari peringkat tertinggi dibawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya pada kebutuhan jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK untuk menetapkan pelamar pengganti;
8. Semua dokumen yang dilengkapi sebagai persyaratan adalah dalam bentuk digital/dokumen elektronik;

9. Panitia seleksi pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 tidak menerima berkas fisik;
 10. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi Helpdesk Panitia Seleksi Pengadaan CPNS di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Willem A. S. nomor 11 Palangka Raya setiap hari kerja mulai pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB;
 11. Semua informasi terkait seleksi CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui :
 - a. Website Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah : <https://kalteng.go.id/>
 - b. Website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : <https://bkd.kalteng.go.id/>
 - c. Media sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
 - 1) Instagram : <https://www.instagram.com/bkdprovkalteng/>
 - 2) Facebook : <https://www.facebook.com/bkdprovkalteng/>
- Pelamar diharapkan mengikuti dan memantau perkembangan pelaksanaan melalui media tersebut;
12. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar;
 13. Keputusan panitia seleksi pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Agustus 2024



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah sebagai laporan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Kesehatan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru; dan
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN I
 PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 800/343/II.1/BKD
 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2024**

A. TENAGA KESEHATAN

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | TENAGA KESEHATAN | | | 98 | |
| 1 | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | SESUAI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR PT.01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024 | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS |
| 2 | APOTEKER AHLI PERTAMA | | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK |
| 3 | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS |
| 4 | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK |
| 5 | ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL | | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK |
| 6 | BIDAN AHLI PERTAMA | | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS |
| 7 | BIDAN TERAMPIL | | UMUM | 5 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN |
| 8 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK | | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | <p>SESUAI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR PT.01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024</p> | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK |
| 10 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM) | | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK |
| 11 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENERELOGI | | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS |
| 12 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK |
| 13 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK |
| 14 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM | | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK |
| 15 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU) | | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS |
| 16 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI | | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK |
| 17 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER | | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK |
| 18 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK | |
| 19 | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | UMUM | 8 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS | |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | FISIOTERAPIS TERAMPIL | <p>SESUAI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR PT.01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024</p> | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK |
| 21 | NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS |
| 22 | OKUPASI TERAPIS TERAMPIL | | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS |
| 23 | PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA | | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK |
| 24 | PERAWAT AHLI PERTAMA | | UMUM | 10 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS |
| 25 | PERAWAT AHLI PERTAMA | | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN |
| 26 | PERAWAT TERAMPIL | | UMUM | 16 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN SEKSI KEPERAWATAN |
| 27 | PERAWAT TERAMPIL | | UMUM | 18 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN |
| 28 | PEREKAM MEDIS TERAMPIL | | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN NONMEDIK SEKSI PENUNJANG MEDIK |
| 29 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA | | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS |
| 30 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK |
| 31 | RADIOGRAFER TERAMPIL | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK | |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL | SESUAI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR PT.01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK |
| 33 | TERAPIS WICARA TERAMPIL | DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024 | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN REHABILITASI |

B. TENAGA TEKNIS

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B | TENAGA TEKNIS | | | 457 | |
| 1 | ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK KOMPUTER | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 2 | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA | D-IV PARIWISATA ; S-1 PARIWISATA | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 3 | ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM |
| 4 | ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5 | ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN |
| 6 | ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | UMUM | 5 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS |
| 7 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 EKONOMI | UMUM | 7 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 8 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 EKONOMI | KHUSUS | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 9 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI BAGIAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA |
| 10 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | S-1 MANAJEMEN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERHUBUNGAN |
| 11 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM SYARIAH | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN |
| 12 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) ; S-1 HUKUM | UMUM | 7 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS |
| 13 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) ; S-1 HUKUM | KHUSUS | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK |
| 15 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 16 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 17 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK | UMUM | 4 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT |
| 18 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 19 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA | S-1 AGRIBISNIS ; S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| 20 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 AGRIBISNIS | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN |
| 21 | ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA | S-1 ILMU TANAH ; D-IV TEKNIK PENGAIRAN ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 GEODESI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| 22 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM BAGIAN TATA USAHA |
| 23 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN | UMUM | 6 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS |
| 24 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| 25 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| 27 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH INSPEKTORAT |
| 28 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 INFORMATIKA | UMUM | 4 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT |
| 29 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 30 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 INFORMATIKA | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 31 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 INFORMATIKA | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERHUBUNGAN |
| 32 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN |
| 33 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 34 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 35 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 36 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 ARSIPARIS | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 ILMU KEARSIPAN ; S-1 KEARSIPAN ; S-1 ARSIPARIS | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| 38 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI BAGIAN TATALAKSANA SUB BAGIAN TATA USAHA |
| 39 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; S-1 KEARSIPAN ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN |
| 40 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 41 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI ; S-1 PEMERINTAHAN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| 42 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN |
| 43 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 HUKUM ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ; S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWAGANEGARAAN ; S-1 AKUNTANSI | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT |
| 44 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 KEARSIPAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM |
| 45 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 46 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT |
| 47 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 48 | AUDITOR AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK SIPIL | UMUM | 8 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH INSPEKTORAT |
| 49 | DOKUMENTALIS HUKUM | D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | DOKUMENTALIS HUKUM | D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM BAGIAN BANTUAN HUKUM |
| 51 | DOKUMENTALIS HUKUM | D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN |
| 52 | DOKUMENTALIS HUKUM | D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI |
| 53 | INSTRUKTUR AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU PERTANIAN | UMUM | 4 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI UPTD BALAI LATIHAN KERJA |
| 54 | INSTRUKTUR AHLI PERTAMA | S-1 MANAJEMEN ; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI ; S-1 BISNIS DIGITAL | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA |
| 55 | KONSERVATOR | S-1 KIMIA ; S-1 ARKEOLOGI | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA UPT MUSEUM BALANGA SEKSI PENGAJIAN DAN PERAWATAN |
| 56 | KURATOR | S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 ARKEOLOGI ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA UPT MUSEUM BALANGA SEKSI PENGAJIAN DAN PERAWATAN |
| 57 | KURATOR | S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 ARKEOLOGI ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 ILMU SEJARAH ; S-1 SENI PERTUNJUKAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BIDANG SEJARAH, PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN |
| 58 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA |
| 59 | MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA | PROFESI DOKTER HEWAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| 60 | MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA | PROFESI DOKTER HEWAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
| 61 | OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL | D-III TEKNOLOGI KOMPUTER | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 62 | PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA | S-1 SEJARAH ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 ARKEOLOGI ; S-1 TATA KELOLA SENI | UMUM | 4 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 | PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA | S-1 SEJARAH ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 ARKEOLOGI ; S-1 TATA KELOLA SENI | KHUSUS | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 64 | PAMONG BUDAYA TERAMPIL | D-III SENI RUPA ; D-III SENI PERTUNJUKAN ; D-III KOMUNIKASI BROADCASTING ; D-III PRODUKSI FILM DAN TELEVISI ; D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | UMUM | 4 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 65 | PAMONG BUDAYA TERAMPIL | D-III SENI RUPA ; D-III SENI PERTUNJUKAN ; D-III KOMUNIKASI BROADCASTING ; D-III PRODUKSI FILM DAN TELEVISI ; D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | KHUSUS | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 66 | PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 HUKUM | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI |
| 67 | PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN | D-IV ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN ; S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN ; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT PELABUHAN PERIKANAN KUMAI KALIMANTAN TENGAH SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN UPT PELABUHAN PERIKANAN KUMAI |
| 68 | PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN | S-1 PERIKANAN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP |
| 69 | PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN | D-IV BUDIDAYA PERAIRAN ; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG PANDARAN KALIMANTAN TENGAH SEKSI PELAYANAN TEKNIK UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG PANDARAN |
| 70 | PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN | D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN ; S-1 ILMU KELAUTAN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT PELABUHAN PERIKANAN KUALA PEMBUANG KALIMANTAN TENGAH SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA UPT PELABUHAN PERIKANAN KUALA PEMBUANG |
| 71 | PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN | S-1 PERIKANAN BUDIDAYA ; S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72 | PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN | D-IV BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 ILMU PERIKANAN | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT SEI RAJA KALIMANTAN TENGAH SEKSI PELAYANAN TEKNIK UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT SEI RAJA |
| 73 | PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN | S-1 BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 ILMU KELAUTAN ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT SEI RAJA KALIMANTAN TENGAH SEKSI TEKNIK PRODUKSI UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT SEI RAJA |
| 74 | PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN | S-1 PERIKANAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT PELABUHAN PERIKANAN KUALA PEMBUANG KALIMANTAN TENGAH SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA UPT PELABUHAN PERIKANAN KUALA PEMBUANG |
| 75 | PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN | D-IV ILMU KELAUTAN ; S-1 ILMU KELAUTAN | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG KELAUTAN DAN PESISIR |
| 76 | PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN | D-IV BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG PANDARAN KALIMANTAN TENGAH SEKSI TEKNIK PRODUKSI UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG PANDARAN |
| 77 | PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | S-1 FARMASI | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU BIDANG PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK |
| 78 | PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN | D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN BAGIAN BUMD DAN BLUD |
| 79 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAGIAN KERJASAMA |
| 80 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET |
| 81 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN |
| 83 | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
| 84 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA | S-1 MATEMATIKA ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM | UMUM | 9 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 85 | PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA | S-1 MATEMATIKA ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM | KHUSUS | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 86 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAGIAN OTONOMI DAERAH |
| 87 | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN SUB BAGIAN TATA USAHA |
| 88 | PENATA KEPROTOKOLAN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BAGIAN PROTOKOL SUB BAGIAN HUBUNGAN KEPROTOKOLAN |
| 89 | PENATA KEPROTOKOLAN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 90 | PENATA KEPROTOKOLAN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BAGIAN PROTOKOL SUB BAGIAN ACARA |
| 91 | PENATA KEPROTOKOLAN | S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BAGIAN PROTOKOL SUB BAGIAN TAMU |
| 92 | PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI ; D-III MANAJEMEN ; D-III MANAJEMEN ASET | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 93 | PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | D-III AKUNTANSI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN KEPEGAWAIAN |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94 | PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN ; D-III AKUNTANSI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 95 | PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI BAGIAN TATALAKSANA SUB BAGIAN TATA USAHA |
| 96 | PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III MANAJEMEN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL |
| 97 | PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | D-III MANAJEMEN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH INSPEKTORAT |
| 98 | PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI BISNIS | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET |
| 99 | PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT |
| 100 | PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL | D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET |
| 101 | PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM | UMUM | 5 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 102 | PENERJEMAH AHLI PERTAMA ; PENERJEMAH BAHASA INGGRIS | S-1 SASTRA INGGRIS ; S-1 BAHASA INGGRIS ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BAGIAN MATERI DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| 103 | PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 PSIKOLOGI | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA |
| 104 | PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 PSIKOLOGI | KHUSUS | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA |
| 105 | PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI PERTAMA | S-1 TEKNOLOGI BENIH ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 PERKEBUNAN ; S-1 PEMULIAAN TANAMAN ; S-1 AGRONOMI ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN UPT BALAI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106 | PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI PERTAMA | D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 TEKNOLOGI BENIH ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 PEMULIAAN TANAMAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| 107 | PENGAWAS BENIH TANAMAN PEMULA | SMK PERTANIAN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN UPT BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 108 | PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA | S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN ; S-1 PRODUKSI PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| 109 | PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | UMUM | 4 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI UPT BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN SAMPIT |
| 110 | PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | UMUM | 4 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI UPT BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PANGKALAN BUN |
| 111 | PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | UMUM | 4 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN |
| 112 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA | S-1 AGROBISNIS ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN ; S-1 AGRONOMI ; S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 PERKEBUNAN ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN |
| 113 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA | S-1 AGROBISNIS ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN ; S-1 AGRONOMI ; S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 PERKEBUNAN ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN UPT BALAI BENIH DAN KEBUN PRODUKSI |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA | D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI PANGAN ; S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 AGROINDUSTRI ; S-1 ILMU PANGAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| 115 | PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA | S-1 ILMU PETERNAKAN ; S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK ; S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| 116 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN | UMUM | 5 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH INSPEKTORAT |
| 117 | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III KOMUNIKASI MASSA | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 118 | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III KOMUNIKASI MASSA | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM BAGIAN RUMAH TANGGA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA GUBERNUR |
| 119 | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III KOMUNIKASI MASSA ; D-III BAHASA INGGRIS | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM BAGIAN RUMAH TANGGA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA WAKIL GUBERNUR |
| 120 | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III KOMUNIKASI MASSA | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BAGIAN PROTOKOL SUB BAGIAN HUBUNGAN KEPROTOKOLAN |
| 121 | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III KOMUNIKASI MASSA | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BAGIAN PROTOKOL SUB BAGIAN TAMU |
| 122 | PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | D-III TEKNOLOGI PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN ; D-III PERIKANAN ; D-III TEKNIK PENGOLAHAN PRODUK PERIKANAN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT PELABUHAN PERIKANAN KUALA PEMBUANG KALIMANTAN TENGAH SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN UPT PELABUHAN PERIKANAN KUALA PEMBUANG |
| 123 | PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | D-III BUDI DAYA IKAN ; D-III TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 124 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 HUKUM | UMUM | 6 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| 126 | PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| 127 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 128 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN TERAMPIL | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III KIMIA | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 129 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA | S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN ; S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) ; S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 AGRONOMI ; S-1 PROTEKSI TANAMAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN UPT BALAI BENIH DAN KEBUN PRODUKSI |
| 130 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA | S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) ; S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) ; S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN ; S-1 PROTEKSI TANAMAN | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN UPT BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 131 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA | S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN ; S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) ; S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 AGRONOMI ; S-1 PROTEKSI TANAMAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN UPT BALAI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN |
| 132 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PEMULA | SMK PERTANIAN ; SPMA SEDERAJAT | UMUM | 25 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN UPT BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 133 | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PEMULA | SMK PERTANIAN ; SPMA SEDERAJAT | KHUSUS | 5 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN UPT BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI ; S-1 AGRONOMI ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 MANAJEMEN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BIDANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI |
| 135 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 136 | PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA | S-1 KEHUTANAN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 137 | PENYULUH NARKOBA AHLI PERTAMA | S-1 SOSIOLOGI ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 138 | PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA | S-1 MANAJEMEN PRODUKSI PERKEBUNAN ; S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN ; S-1 MANAJEMEN PERTANIAN ; S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS ; S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 PERKEBUNAN ; S-1 TEKNOLOGI PERKEBUNAN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 PEMULIAAN TANAMAN ; S-1 AGRONOMI ; S-1 PENYULUHAN PERKEBUNAN ; S-1 TEKNOLOGI MEKANISASI PERTANIAN ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA ; S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI ; S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 PROTEKSI TANAMAN ; S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS ; S-1 PENYULUHAN PERTANIAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN BIDANG PEMBINAAN USAHA, PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI PERKEBUNAN |
| 139 | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 HUKUM | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM BAGIAN BANTUAN HUKUM |
| 140 | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 HUKUM | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI |
| 141 | PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | S-1 HUKUM | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 142 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO HUKUM |
| 143 | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 HUKUM ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ; S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN ; S-1 KOMUNIKASI ; S-1 MANAJEMEN | UMUM | 5 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT |
| 144 | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 SARJANA EKONOMI ; S-1 SARJANA MANAJEMEN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 145 | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| 146 | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO UMUM BAGIAN TATA USAHA |
| 147 | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 INFORMATIKA | UMUM | 4 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT |
| 148 | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI ; S-1 KOMUNIKASI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 PENDIDIKAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU SOSIAL | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER DAN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA |
| 149 | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS ; S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS PERTANIAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AGRIBISNIS PERTANIAN ; S-1 AGRIBISNIS SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN SEKRETARIAT |
| 150 | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT |
| 151 | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN |
| 152 | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 KOMUNIKASI ; S-1 ADMINISTRASI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG PAJAK DAERAH |
| 153 | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154 | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 155 | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 ILMU AKUNTANSI ; S-1 ILMU MANAJEMEN ; S-1 ILMU EKONOMI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM |
| 156 | POLISI KEHUTANAN PEMULA | SMK KEHUTANAN | UMUM | 30 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEHUTANAN |
| 157 | POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 SOSIOLOGI | UMUM | 15 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 158 | POLISI PAMONG PRAJA PEMULA | SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMA IPA ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SMA IPS ; SLTA KEJURUAN ; SMK ; SMK TEKNIK | UMUM | 15 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 159 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 160 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 161 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN |
| 162 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 SOSIOLOGI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT |
| 163 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 KOMUNIKASI MASSA ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; S-1 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN SEKRETARIAT |
| 164 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | UMUM | 5 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS |
| 165 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | D-IV MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 166 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 167 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 168 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN |
| 169 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT |
| 170 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| 171 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN |
| 172 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK KOMPUTER | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |
| 173 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT |
| 174 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER | UMUM | 4 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN |
| 175 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH INSPEKTORAT |
| 176 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 177 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT |
| 178 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI BAGIAN TATALAKSANA |
| 179 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 180 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER | UMUM | 8 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
| 182 | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI |
| 183 | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III SISTEM INFORMASI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
| 184 | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI | UMUM | 3 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT |
| 185 | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA | UMUM | 2 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO |
| 186 | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN |
| 187 | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | UMUM | 9 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.DORIS SYLVANUS |
| 188 | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III SISTEM INFORMASI ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
| 189 | PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL | D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN |
| 190 | PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
| 191 | SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA | S-1 SAINS INFORMASI GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK GEOMATIKA ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK GEODESI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS FORMASI | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192 | SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA | S-1 SAINS DATA SPASIAL ; S-1 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM ; S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA ; S-1 TEKNIK GEOMATIKA ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH ; S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 TEKNIK GEODESI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN BIDANG PEMBINAAN USAHA, PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI PERKEBUNAN |
| 193 | WIDYAISWARA AHLI PERTAMA | S-2 EKONOMI | UMUM | 1 | PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH |

FORMAT SURAT LAMARAN

Kepada Yth.
Gubernur Kalimantan Tengah
c.q. Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah
di -
Palangka Raya

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Sesuai Domisili :
Alamat Sesuai KTP :
Email :
Nomor HP :
Pendidikan :
Jenis Kebutuhan : Khusus / Umum *)
Jabatan yang Dilamar :
Penempatan :

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen kelengkapan yang telah diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut :

1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
2. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/ Surat Keterangan Kependudukan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
3. *Scan* Ijazah dan Transkrip Nilai asli;
4. *Scan* Surat Pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
5. Sertifikat atau tangkapan layar (*screenshot*) pada PDDikti/BAN-PT akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan. **)
6. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus jabatan yang dilamar (untuk Tenaga Kesehatan Melampirkan Surat Tanda Registrasi, un);
7. *Scan* Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya. ***)
8. *Scan* Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan tinggi badan, sehat jasmani dan rohani, serta bukan penyandang disabilitas. ****)

Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia penyelenggara seleksi untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

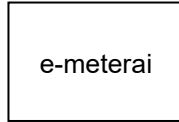
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

.....,2024

Hormat Saya,

tanda tangan basah

(Nama Lengkap)



Catatan :

- *Posisi e-meterai disebelah tanda tangan dan tidak boleh menutupi gambar ataupun tulisan apapun*

Keterangan :

**) Pilih salah satu*

****) Berlaku bagi pelamar dengan tingkat pendidikan D-III dan S-1/D-IV/Profesi*

*****) Berlaku bagi penyandang disabilitas*

******) Berlaku bagi pelamar jabatan Polisi Pamong Praja*

FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 POIN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

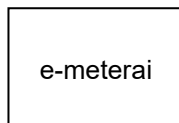
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,2024

Hormat Saya,

tanda tangan basah

(Nama Lengkap)



Catatan :

- *Posisi e-meterai disebelah tanda tangan dan tidak boleh menutupi gambar ataupun tulisan apapun*

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

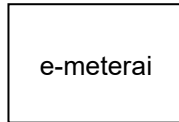
Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya siap dan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak mengajukan pindah ke Instansi lain dengan alasan pribadi, paling singkat selama **10 (sepuluh)** tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti melanggar surat pernyataan ini.

.....,2024

Hormat Saya,



tanda tangan basah

(Nama Lengkap)

Catatan :

- *Posisi e-meterai disebelah tanda tangan dan tidak boleh menutupi gambar ataupun tulisan apapun*